

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

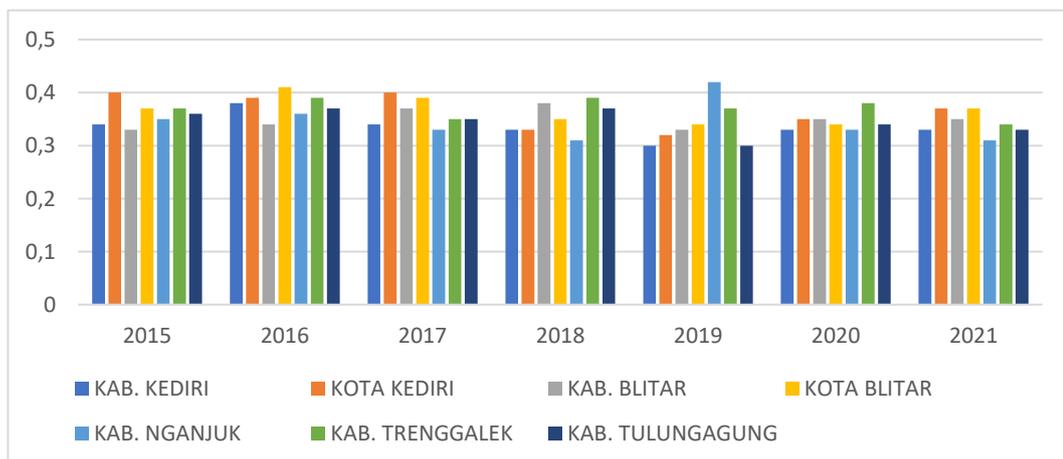
Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu dari beberapa tujuan dari pembangunan ekonomi suatu negara. Namun, kesejahteraan ini memiliki hambatan yaitu ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini termasuk permasalahan yang cukup besar yang dihadapi negara berkembang termasuk Indonesia. Dimana dapat menyebabkan kesenjangan dan peningkatan kemiskinan kelompok masyarakat yang menerima pendapatan rendah dan kelompok masyarakat yang menerima pendapatan tinggi (Tambunan, 2013). Pembangunan ekonomi bukanlah poin utama dalam memajukan suatu negara, namun pembangunan ekonomi dapat digunakan sebagai jembatan untuk mengurangi kemiskinan dan memperkecil resiko terjadinya ketimpangan.

Ketimpangan distribusi pendapatan dapat disebabkan karena adanya perbedaan sumber daya alam dan kondisi demografi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah yang menyebabkan munculnya istilah daerah maju dan daerah berkembang. Hal ini dapat memicu adanya wilayah yang maju dan wilayah yang terbelakang (Kuncoro, 2022). Ketimpangan memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu dengan adanya ketimpangan, maka akan mendorong wilayah yang terbelakang untuk dapat bersaing, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan yaitu terjadi inefisiensi ekonomi, melemahnya stabilitas sosial, dan solidaritas serta ketimpangan yang tinggi umumnya dianggap tidak adil. Ketimpangan pendapatan

merupakan isu penting dalam pembangunan karena ketimpangan pendapatan memiliki keterkaitan dengan distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan, maka distribusi pendapatannya juga semakin tidak merata. Hal inilah yang menyebabkan kesenjangan antara kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah semakin besar. Ketimpangan distribusi pendapatan dapat diukur dengan menggunakan Indeks Gini atau Gini Ratio. Gini rasio sendiri merupakan pengukuran yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan, dimana semakin tinggi angka gini rasio, maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pendapatannya. Sebaliknya, jika semakin rendah angka gini rasio, maka tingkat distribusi pendapatannya semakin merata.

Grafik 1.1

Gini Rasio 7 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2021



Sumber : (Anonim, 2022) diolah

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, dapat dilihat bahwa rata-rata Gini Rasio di 7 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi. Terlihat pada Kabupaten Kediri yang mengalami kenaikan dan penurunan angka dengan

rata-rata gini rasio mencapai angka 0,34% dalam periode 7 tahun. Kota Kediri mengalami kenaikan dan penurunan angka dengan rata-rata gini rasio mencapai angka 0,37% dalam periode 7 tahun. Kabupaten Blitar mengalami kenaikan dan penurunan angka dengan rata-rata gini rasio mencapai angka 0,35% dalam periode 7 tahun. Kota Blitar mengalami kenaikan dan penurunan angka dengan rata-rata gini rasio mencapai angka 0,37% dalam periode 7 tahun. Kabupaten Nganjuk mengalami kenaikan dan penurunan angka dengan rata-rata gini rasio mencapai angka 0,34% dalam periode 7 tahun. Kabupaten Trenggalek mengalami kenaikan dan penurunan angka dengan rata-rata gini rasio mencapai angka 0,37% dalam periode 7 tahun. Dan yang terakhir pada Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan dan penurunan angka dengan rata-rata gini rasio mencapai angka 0,35% dalam periode 7 tahun.

7 kabupaten/kota tersebut dulunya merupakan wilayah Karesidenan Kediri yang didirikan dengan tujuan awal untuk kegiatan perdagangan, dimana ibukota Karesidenan Kediri terletak di Kota Kediri (Anonim, 2022). Kota Kediri memiliki aset yang besar yaitu PT Gudang Garam Tbk. yang mana seharusnya dapat menjadi peluang kerja bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang berbatasan langsung dengan kota Kediri. Namun berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tersebut menunjukkan bahwa pada 7 Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur atau wilayah Eks-Karesidenan Kediri yang meliputi Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung masih terjadi ketimpangan distribusi pendapatan sedang dilihat dari nilai gini rasio pada 7 wilayah tersebut yang lebih besar dari 0,3% dan kurang dari 0,5% ($0,3\% \leq G \leq 0,5\%$). Yang berarti wilayah-wilayah tersebut memiliki

pertumbuhan ekonomi yang cenderung baik namun juga memiliki permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan karena adanya ketidakmerataan distribusi pendapatan masyarakat. Bagaimana pun bentuk ketimpangan yang terjadi harus segera diatasi karena jika dibiarkan semakin lama dapat menimbulkan permasalahan serius yang dapat mengganggu perekonomian pada suatu daerah khususnya pada 7 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tersebut.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dalam setiap negara yaitu IPM atau Indeks Pembangunan Manusia (Todaro, 2015). Salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks kesehatan, dimana indikator yang digunakan dalam mengukur indeks kesehatan yaitu Angka Harapan hidup (AHH). Peningkatan pelayanan kesehatan dan daya beli masyarakat akan turut meningkatkan akses pelayanan kesehatan, serta kemampuan dalam pemenuhan gizi dan kalori, sehingga dengan kesehatan yang baik masyarakat mampu menempuh pendidikan yang baik dan mendapat pekerjaan yang layak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidup masyarakat (Anonim, 2022).

Pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam investasi pembangunan manusia serta dianggap sebagai faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Anwar, 2018). Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada masyarakat yaitu diantaranya pada jenjang Sekolah Dasar (SD) ditempuh selama 6 tahun, pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditempuh selama 3 Tahun, pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) ditempuh selama 3 tahun, dengan total waktu pendidikan selama 12 tahun sampai jenjang SMA, kemudian dilanjutkan

pada jenjang perkuliahan yang umumnya ditempuh selama 4 tahun dengan total waktu pendidikan 16 tahun hingga jenjang perkuliahan atau bahkan bisa lebih. Saat masyarakat telah menyelesaikan pendidikannya, mereka akan memasuki persaingan tenaga kerja dimana jenjang pendidikan yang ditempuh akan mempengaruhi produktivitas dan juga penghasilan yang diterima. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat apabila pertumbuhan ekonomi dan taraf kehidupan masyarakat mengalami peningkatan yang mana hal ini berkorelasi dengan indeks pembangunan manusia (Zusanti, et al 2020). Sehingga dapat diperoleh asumsi bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masyarakat dapat menekan angka ketimpangan distribusi pendapatan apabila dibarengi dengan tingginya produktivitas sesuai jenjang pendidikan yang telah diselesaikan.

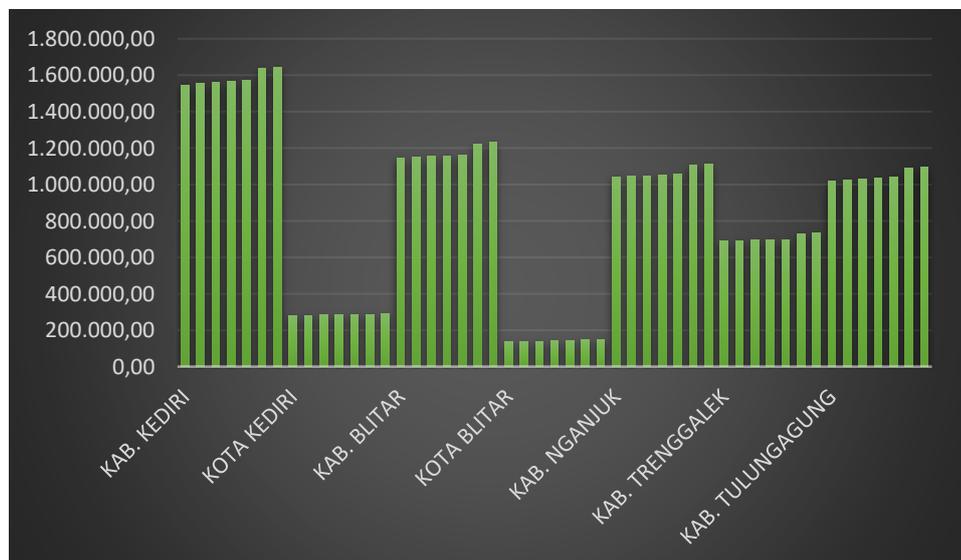
Pembangunan manusia dalam jangka panjang akan berdampak pada kenaikan pendapatan perkapita masyarakat yang diikuti dengan kenaikan pengeluaran perkapita masyarakat. Menurut Patriotika (2015) pengeluaran perkapita dapat digunakan sebagai indikator dalam mengukur standar hidup manusia, juga digunakan dalam mengukur tingkat daya beli masyarakat yang berhubungan dengan pencapaian kesejahteraan pada suatu negara. Pengeluaran perkapita masyarakat dijadikan sebagai gambaran tingkat daya beli atau *Purchasing Power Parity* (PPP) pada masyarakat, yang juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana kondisi pembangunan manusia pada suatu daerah.

Menurut Arsyad (2014) terdapat 8 (delapan) hal yang menyebabkan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan pada negara berkembang, salah

satunya yaitu tingginya pertumbuhan penduduk sehingga akan berdampak pada penurunan pendapatan perkapita. Tingginya pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah apabila tidak diiringi dengan kenaikan tingkat produktivitas, maka akan menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat dimana akan berdampak pada penurunan pendapatan perkapita nya. Permasalahan lain yang akan muncul yaitu ketika jumlah penduduk tinggi maka akan diikuti dengan tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan pada masyarakat yang pada akhirnya akan menyebabkan celah ketimpangan distribusi pendapatan pada masyarakat semakin tinggi.

Grafik 1.2

Jumlah Penduduk 7 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2015-2021



Sumber : (Anonim, 2021) diolah

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk pada 7 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur dari tahun 2015 hingga 2021 mengalami

sedikit kenaikan selama periode 7 tahun. Jumlah penduduk tertinggi dari 7 kabupaten/kota tersebut yang pertama ditempati oleh Kabupaten Kediri dengan rata-rata jumlah penduduk sebanyak 1.583.534,14 jiwa. Dilanjutkan dengan Kabupaten Blitar dengan rata-rata jumlah penduduk sebanyak 1.174.549,14 jiwa. Selanjutnya adalah Kabupaten Nganjuk dengan rata-rata jumlah penduduk sebanyak 1.065.140,86 jiwa. Kabupaten Tulungagung dengan rata-rata jumlah penduduk sebanyak 1.048.431,14 jiwa. Kabupaten Trenggalek dengan rata-rata jumlah penduduk sebanyak 704.401,29 jiwa. Kota Kediri dengan rata-rata jumlah penduduk sebanyak 284.819 jiwa. Dan yang terakhir adalah Kota Blitar dengan rata-rata jumlah penduduk sebanyak 147.769,57 jiwa dalam periode 7 tahun terhitung sejak 2015 hingga 2021.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan daerah tidak selalu sama, dikarenakan setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Juga menurut Todaro (2015) terdapat asumsi bahwa IPM dianggap sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada suatu wilayah atau negara maka hal inilah yang mendasari peneliti untuk memilih variabel Pengeluaran Perkapita, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup (AHH), dan Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di 7 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Dengan pemilihan variabel tersebut, untuk mengetahui pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengeluaran Perkapita, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup (AHH), dan Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di 7 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah Pengeluaran Perkapita Berpengaruh Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di 7 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Berpengaruh Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di 7 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah Angka Harapan Hidup (AHH) Berpengaruh Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di 7 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah Jumlah Penduduk Berpengaruh Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di 7 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Jika dilihat dari rumusan masalahnya, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk Menganalisis Pengaruh Pengeluaran Perkapita Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di 7 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk Menganalisis Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di 7 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk Menganalisis Pengaruh Angka Harapan Hidup (AHH) Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di 7 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.
4. Untuk Menganalisis Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di 7 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini berfokus pada pengaruh dari variabel independen yang terdiri Pengeluaran Perkapita, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup (AHH), dan Jumlah Penduduk terhadap variabel dependen Ketimpangan Distribusi Pendapatan di 7 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur periode 2015-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap kajian khususnya di bidang ilmu ekonomi yang terkait dengan Analisis Pengaruh Pengeluaran Perkapita, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup (AHH), dan Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di 7 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.
2. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah 7 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dalam menentukan arah kebijakan di masa yang akan datang.
3. Bagi Penelitian selanjutnya diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi penelitian selanjutnya bagi mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.